

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam hubungan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat, pendidikan mengemban tiga sifat penting. Sukmadinata (1997: 30) mengungkapkan bahwa ketiga sifat tersebut yaitu: *pertama*, pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai, yang diarahkan pada pengembangan pribadi anak, agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat. *Kedua*, pendidikan diarahkan kepada kehidupan dalam masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh masyarakat tempat pendidikan berlangsung.

Dalam perkembangan persaingan global yang semakin ketat, eksistensi individu, masyarakat ataupun organisasi akan ditentukan oleh kepemilikan keunggulan daya saing yang berkesinambungan (*sustained competitive advantage*). Hanya dengan sumberdaya manusia yang unggul dan mempunyai daya saing tinggi, suatu masyarakat ataupun organisasi dapat memprediksi, mengantisipasi dan mengendalikan setiap perubahan kearah yang diharapkan. Penguasaan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya kekuatan untuk mempertahankan eksistensi di arena pasar bebas.

Perkembangan situasi global yang sangat pesat telah mempengaruhi negara-negara maju dan berkembang. Menyikapi akselerasi globak yang sangat cepat, tentunya bangsa indonesia semakin siap, mematangkan kualitas diri

(Sumberdaya Manusia) agar tidak larut dalam gelombang perubahan global (Setiady, 2007:12)

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, faktor internal penggerak perubahan yakni pemberlakuan otonomi daerah, sudah membawa perubahan pada tatanan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, hal tersebut menuntut perubahan terhadap beberapa aspek yang diantaranya pelayanan, kemandirian, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Komponen yang paling menentukan keberhasilan otonomi daerah dengan segala tuntutan yang dihadapinya tiada lain adalah kualitas sumberdaya manusia.

Potensi Sumber daya manusia telah membuahkan fenomena globalisasi yang menunjukkan banyak perubahan. Di satu sisi perubahan itu berdampak positif, yaitu berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemudahan kegiatan manusia. Namun pada sisi lain hal itu berdampak negatif terhadap perilaku manusia, seperti terjadinya benturan-benturan nilai kehidupan yang tidak terelakan bahkan telah menyeret manusia pada krisis multi dimensi diantaranya dampak "dunia tanpa batas" *Bordeless World Power and Strategy in the Interlinked Economy* (Ohmae: 1991)

Dalam konteks sumberdaya manusia bidang pertanian, terdapat empat pilar yang harus diperhatikan yaitu petani, petugas/pejabat struktural, pejabat fungsional dan *stakeholders*. Kondisi dan permasalahan sumberdaya manusia pertanian dicirikan oleh tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi tenaga kerja sektor pertanian Indonesia meliputi SD 83%, SLTP 12%, SLTA 5%, dan perguruan tinggi kurang dari 1%. Berdasarkan latar belakang pendidikan, aparatur pertanian didominasi

oleh lulusan SLTA (65%); sedangkan dilihat dari sebaran lokasi administrasi, aparatur pertanian di pusat berjumlah 62%, di provinsi 20% dan di kabupaten 18%. Tingkat pendidikan petani di Indonesia sekitar 87% berlatar belakang SD (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2006).

Dalam konteks pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26 ayat 3 butir (3) mengemukakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan.

Akhir dari proses pendidikan kemampuan peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual. Ketiga aspek inilah (kecerdasan, sikap dan keterampilan) arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. (Sumarni; 2009)

Tampaknya pelaksanaan pendidikan belum sesuai dengan harapan diatas. Para guru disekolah masih bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang diberikannya, seakan-akan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena selama ini belum ada pedoman yang bisa dijadikan rujukan bagaimana seharusnya proses pendidikan berlangsung. Seperti juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dikatakan bahwa Standar Pendidikan

Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1)

Semakin tingginya kasus amoral / asusila yang terjadi di Indonesia, mulai dari korupsi, kolusi, penggunaan narkoba, sampai dengan tawuran antar sekolah, MBA (*married by accident*), dan berbagai kasus lainnya merupakan fenomena sosial yang mengundang keprihatinan. Dalam kondisi seperti ini, dunia pendidikan menjadi sorotan, Pendidikan dinyatakan telah gagal mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. (Zuriah;2007)

Salah satu masalah yang dihadapi pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi tanpa dituntut memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi (Sanjaya, W 2006:1)

Pengembangan sumberdaya manusia pertanian melalui SMK SPP dapat terlaksana dan sesuai dengan tujuan dalam PP di atas, jika setiap komponen dan fungsi organisasi baik di pusat maupun di daerah memandang upaya pengembangan sumberdaya manusia bukan sebagai unsur penunjang, melainkan merupakan bagian integral dari masing-masing fungsi organisasi (*integrative linkages*). Sumberdaya manusia pertanian menyangkut sekitar 39,5 juta tenaga kerja pertanian yang terdiri atas petani dan petugas, serta jutaan *stakeholders* pembangunan pertanian dengan segenap kompleksitas permasalahan pada setiap

segmen sumberdaya manusia pertanian. Masalah utama sumberdaya manusia pertanian diantaranya menyangkut tingkat pendidikan rendah, produktivitas rendah dan sebaran yang tidak merata. Untuk itu, diperlukan acuan yang menjadi kebijakan makro pengembangan sumberdaya manusia pertanian, baik di pusat maupun di daerah.

Memajukan inovasi dalam pembangunan pertanian mungkin tak tercapai dalam waktu lima tahun, perlu satu generasi lagi. Di sini diperlukan kebesaran hati para pemimpin untuk tidak bervisi jangka pendek, tapi jauh strategis ke depan sebagai negarawan. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diberi mandat oleh pemerintah untuk mengembangkan sumberdaya manusia pertanian telah menyusun kebijakan dimaksud. Hal tersebut dituangkan dalam *Grand Design Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian* untuk sepuluh tahun kedepan (*Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2006*). *Grand Design* tersebut diharapkan mampu mengantisipasi perubahan, tantangan, kebutuhan perkembangan teknologi, aspirasi yang berkembang dan dinamika pembangunan dimasa depan, serta isu global yang menjadi komitmen Kementerian Pertanian. Dengan adanya *Grand Design* yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, diharapkan tercapainya harmonisasi, koordinasi, sinergi dan efisiensi pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Berdasarkan *grand design* tersebut, sumberdaya manusia pertanian Indonesia dibangun dan dikembangkan diatas empat landasan filosofis yang disebut “*Catur Gatra*”, yaitu;

1. Berbudi pekerti luhur (*morale*);

2. Rajin dan tekun (*diligent*);
3. Mampu bekerjasama (*cooperative*); dan
4. Bersifat pembaharu (*innovative*)

Catur Gatra tersebut merupakan ciri utama dari sosok manusia pertanian Indonesia. Dalam rangka mengimplementasikan pengembangan sumberdaya pertanian tersebut, dicanangkan empat strategi utama, yaitu;

1. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia pertanian;
2. Membangun sistem pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan pengembangan sumberdaya manusia pertanian, dan;
4. Mengembangkan piranti lunak dan piranti keras perangkat pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

SMK SPP sebagai salah satu entitas penting dalam upaya mengembangkan sumberdaya pertanian, belum memberikan kontribusinya secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya lulusan SMK SPP saat ini yang hanya dapat bekerja atau dipekerjakan di dunia usaha atau industri tertentu dan belum mampu menyediakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri (berwirausaha). Jika hal ini terus berlangsung bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang terjadi ledakan tenaga kerja terdidik lulusan SMK SPP yang tidak memperoleh kesempatan kerja. Dengan kata lain melonjaknya pengangguran terdidik di sektor pertanian.

Masih banyak adanya alumni SMK SPP Tanjungsari setelah lulus sekolah bekerja tidak dalam dunia pertanian lagi, walaupun mereka telah didik diberikan pelajaran kemandirian yaitu melalui pelajaran kewirausahaan yang akan

membekali siswa kelak setelah lulus sekolah. Tingkat kehadiran rata-rata peserta didik pada SMK SPP Tanjungsari masih berkisar 95%, juga tingkat keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan pengembangan pribadi hanya mencapai 10% saja, padahal kegiatan pembentukan kepribadian melalui kegiatan ekstra kulikuler sangat penting bagi pembentukan karakter siswa terhadap pembentukan sosok manusia pertanian.

Dengan demikian, tuntutan dan tantangan kedepan dalam konteks pembangunan sumberdaya manusia pertanian adalah bagaimana membentuk sumberdaya manusia pertanian yang memiliki sikap mental wirausaha (kewirausahaan), berkepribadian catur gatra, serta memiliki karakter sebagaimana disebutkan dalam bunyi tujuan dan fungsi pendidikan nasional (UU No 20 tahun 2003 bab II pasal 3).

Proses pendidikan dengan orientasi kepada pembentukan karakter lulusan yang memiliki keterpaduan antara kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan lebih lanjut menjadi tantangan bagi para pengelola SMK SPP dewasa ini.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan kajian lebih lanjut tentang upaya pembinaan sumberdaya manusia pertanian di lingkungan SMK SPP yang berbasis kepada pendidikan nilai, khususnya nilai-nilai catur gatra yang menjadi identitas sumberdaya pertanian Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam *grand design* pengembangan sumberdaya manusia pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui pelajaran kewirausahaan.

Sikap mental kewirausahaan seperti kemandirian, kepemimpinan, keteladanan, kedisiplinan, dan kerja keras merupakan sesuatu yang wajib terintegrasi dalam pribadi sumberdaya pertanian Indonesia. Demikian halnya dengan serangkaian karakter yang ditegaskan dalam rumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional (UU No 20 tahun 2003 bab II pasal 3).

Core value sumberdaya pertanian Indonesia yang terformulasikan dalam konsep catur gatra, yaitu; berbudi pekerti luhur (*morale*); rajin dan tekun (*diligent*); mampu bekerjasama (*cooperative*); dan bersifat pembaharuan (*innovative*), juga hendaknya terejawantahkan dalam kurikulum dan model pembelajaran yang dikembangkan di lingkungan SMK-SPP. Dalam konteks pembelajaran di sekolah menengah kejuruan, mata pelajaran kewirausahaan merupakan mata pelajaran yang paling beririsan dengan empat nilai utama catur gatra tersebut. Mata pelajaran kewirausahaan bertujuan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku wirausaha. Isi mata pelajaran kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut lebih aktif untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran kewirausahaan dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan, yang sangat terkait dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik agar dapat berusaha secara mandiri. Ruang lingkup mata pelajaran Kewirausahaan di SMK SPP Tanjungsari, meliputi sikap dan perilaku wirausaha;Kepemimpinan dan perilaku prestatif; Solusi masalah; Pembuatan keputusan. Namun demikian, berbagai fenomena seperti yang sudah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa masih adanya

ketimpangan antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran kewirausahaan khususnya dan kualifikasi lulusan SMK SPP secara umum sebagai sumberdaya pertanian harapan bangsa yang diharapkan dengan yang terjadi.

Dari hasil observasi lapangan diperoleh data bahwa penjamin mutu internal lembaga sekolah belum ada. Kehadiran Guru sebagai tenaga pengajar 90% dari yang dijadwalkan. Angka putus sekolah masih ada sekitar 5% dari jumlah peserta didik yang ada. Prestasi calon peserta didik sebagian besar adalah menengah kebawah. Dalam kegiatan proses belajar mengajar tampak beberapa kasus yang penulis tangkap mengenai perilaku peserta didik seperti, didalam hand phone terdapat video dan gambar porno, pada proses belajar yaitu, peserta didik ketahuan keluar kelas sebelum jam belajar selesai, masi ada peserta didik pada waktu tes tertulis yang mencontek, hasil akhir pembelajaran peserta didik dalam mata ajar kewirausahaan yang belum maksimal dalam penugasan individu dan kelompok baik itu dari intrakulikuler atau pun ekstrakulikuler yang mendukung. Sehingga apabila hal tersebut masi tampak terjadi didalam pendidikan maka tujuan catur gatra tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa masalah tersebut seharusnya bukan dijadikan wacana perdebatan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab, namun harus menjadi bahan pemikiran untuk mencari solusi tepat sebagai upaya cerdas dalam sistem pendidikan. Pentingnya diangkat kembali pendidikan nilai catur gatra yang diajarkan di SMK SPP harus menjadi perhatian, lalu apa dan bagaimana system pembelajaran nilai catur gatra ini, khususnya melalui pelajaran kewirausahaan.

Hal tersebut yang akan menjadi titik tolak pengkajian atau fokus penelitian dalam penelitian ini, tepatnya seperti apa sesungguhnya model pembelajaran berbasis nilai-nilai catur gatra yang dipraktikan di lingkungan SMK SPP selama ini dan seperti apa proses pembelajaran kewirausahaan yang dipraktikan di lingkungan SMK SPP, serta model pengembangan seperti apa yang dapat menjadi alternatif bagi para *stakeholder* pendidikan SMK SPP dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis nilai-nilai catur gatra sehingga dihasilkan lulusan SMK SPP yang sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan memiliki kepribadian utuh.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang akan muncul dari paparan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, diketahui belum ada pengembangan model pendidikan nilai catur gatra yang melibatkan peserta didik, pengajar dan lembaga pendidikan;
- b. Fakta dilapangan ditemukan bahwa, nilai-nilai catur gatra belum tampak mengintegrasikan terhadap pelajaran kewirausahaan;
- c. Diperlukan peningkatan pembelajaran untuk mengarah kepada nilai-nilai catur gatra baik itu dari bahan yang diajarkan dan tenaga didiknya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana Nilai catur gatra sebelum pembelajaran kewirausahaan yang dipraktikan di SMK SPP Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana nilai catur gatra pada peserta didik dalam mempelajari kewirausahaan?
3. Bagaimana proses penerapan nilai catur gatra melalui pembelajaran kewirausahaan yang dipraktikan di SMK SPP Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana Model Pengembangan yang dapat menjadi alternatif dalam mempraktikan pendidikan nilai catur gatra melalui pembelajaran kewirausahaan di lingkungan SMK SPP Tanjungsari Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model pengembangan tentang implementasi pembelajaran berbasis nilai-nilai catur gatra di lingkungan SMK SPP dalam upaya membentuk sumberdaya pertanian. Adapun secara khusus penelelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Model pembelajaran berbasis catur gatra yang dipraktikan di SMK SPP Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
2. Proses pendidikan nilai catur gatra yang dipraktikan oleh peserta didik;
3. Proses pendidikan nilai catur gatra melalui pembelajaran kewirausahaan yang dipraktikan di SMK SPP Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
4. Model pengembangan yang dapat menjadi alternatif dalam mempraktikan pendidikan nilai catur gatra melalui pembelajaran kewirausahaan di lingkungan SMK SPP Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi dunia pendidikan dalam membina dan mengembangkan pendidikan nilai di lingkungan persekolahan, khususnya di SMK SPP. Secara rinci penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara khusus dapat memberikan gambaran tentang kondisi objektif proses pembelajaran berbasis nilai catur gatra pada mata pelajaran kewirausahaan yang dipraktikan di SMK SPP serta menjadi rujukan para praktisi pendidikan di lingkungan sekolah dalam melakukan proses pembelajaran berbasis nilai catur gatra.
2. Pada tataran teoretis dapat memberikan kontribusi dalam mengkonstruk model pembelajaran nilai catur gatra di institusi persekolahan, baik dalam pembinaan kematangan budi pekerti luhur, penanaman nilai rajin dan tekun (*diligent*), bekerjasama (*cooperative*), serta bersifat pembaharuan (*innovative*) sebagai identitas sumberdaya manusia pertanian Indonesia.
3. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan secara institusional pada khususnya sebagai sebuah kelembagaan pendidikan yang memiliki peranan strategis dalam melakukan proses pembelajaran nilai moral pada generasi muda bangsa.
4. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para *stakeholder* pendidikan, khususnya pemegang kebijakan di lingkungan SMK SPP dalam merumuskan program yang lebih tepat demi optimalnya proses pencapaian tujuan pendidikan nasional.
5. Dapat dijadikan penelitian awal dan rujukan ilmiah untuk mengembangkan model pembelajaran nilai di sekolah yang lebih komprehensif dan aplikable.

E. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK SPP Tanjungsari, dalam hal ini penulis memilih sekolah yang ditunjukkan diantaranya : berdasarkan surat ijin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang, nomor 070/334-Litbang/Bapp/2010, tanggal 5 Oktober 2010

Dalam penelitian ini, subjek penelitian lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelian. Sumber data yang dipilih tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang pendidikan nilai-nilai catur gatra dan bentuk program pembinaan serta pengembangan pendidikannya bagi siswa SMK-SPP.

Untuk mencapai tujuan penelitian, ditetapkan subjek penelitian secara purposive mengikuti alur proses penelitian dengan tetap mengacu kepada tujuan penelitian sebagai garis panduan. Adapun subjek penelitian yang dijadikan sumber data terdiri atas guru mata pelajaran kewirausahaan, kepala sekolah, tenaga kependidikan, siswa/i, alumni, dan komite sekolah di SMK-SPP Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Dipilihnya SMK-SPP Tanjungsari didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. SMK-SPP Tanjungsari berstatus akreditasi Negeri berdasarkan SK Departemen Pertanian RI No. DI.210/282/IV/2002 tanggal 24 April 2002;
2. SMK-SPP Tanjungsari merupakan Pembina Koordinator SMK-SPP Wilayah Binaan se Jawa Barat;
3. SMK-SPP Tanjungsari memiliki Program magang bagi siswa berprestasi di Fukui Norin High School – Jepang;

4. Sesuai dengan tuntutan di lapangan, para siswa diberikan keterampilan wirausaha yaitu melalui praktik wirausaha yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Praktik diarahkan untuk melakukan pengumpulan informasi pasar, penentuan jenis usaha, penyusunan rencana usaha, serta pelaksanaan usaha dan penyusunan laporan.
5. Keberadaannya di daerah dengan jumlah siswa yang memadai.

